



Buletin Parlementaria

Nomor 972/III/VIII/2017 • Agustus 2017



**Miliki Pusat Penelitian
Kunci Pemanfaatan Panas Bumi**

**Pariwisata Sumba Belum
Terekspose**

Pemerintah Juga Harus Ditanya Kinerjanya Legislasinya

**TIDAK
DIPERJUAL
BELIKAN**



Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di media center Gedung DPR RI saat diskusi forum legislasi

Pemerintah Juga Harus Ditanya Kinerja Legislasinya

Kinerja DPR RI terkait perundang-undangan atau legislasi yang dihasilkan, selalu menjadi sorotan publik. Kinerja legislasi ini seolah hanya menjadi satu-satunya patokan kinerja DPR RI. Padahal, masih ada fungsi-fungsi lain yang dijalankan oleh DPR. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta masyarakat tak hanya bertanya kepada DPR RI terkait kinerja legislasi ini, melainkan juga kepada pemerintah.

Demikian dikatakannya pada acara Forum Legislasi bertema 'Penyederhanaan Target Prolegnas Masuki Tahun Politik' bersama pengamat politik Hendri Satrio, di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Selasa (8/8/2017)

"DPR RI memang memiliki tanggung jawab menyusun perundang-undangan, tapi pembahasan dan keputusan tak saja ada di parlemen, tapi juga pemerintah. Kan sering juga pemerintah tak disiplin, dan juga tak memahami masalah legislasi itu sendiri, sehingga lambat pembahasannya," tegas Fahri.

Pimpinan DPR RI bidang Korkesra ini juga meminta masyarakat tak menilai

kinerja DPR RI itu dari jumlah Undang-undang yang dihasilkan, melainkan kualitas juga menjadi rujukan tersendiri. Seperti UU Pemilu, UU KPK, dan lain-lain.

Fahri menjelaskan, DPR bersama pemerintah menyepakati Prolegnas, setelah melewati pembicaraan dengan pemerintah. Pada tahun 2017 ini, disepakati sekitar 49 RUU di awal tahun 2017. Selama tahun 2017 ini, ada beberapa RUU yang telah disahkan, diantaranya UU Sistem Perbukuan, UU Kebudayaan, UU Arsitek, UU Pemilu, dan UU lainnya.

"Prolegnas yang berasal dari perencanaan pemerintah, jauh lebih banyak daripada perencanaan DPR. Usulan pemerintah lebih banyak daripada usulan

DPR. Umumnya pemerintah datang dengan draf UU yang lebih matang, karena otak yang membahas itu dari semua kementerian, dengan jutaan pegawai pemerintah," kilahnya.

Artinya, nilai Fahri, kinerja legislasi eksekutif jauh lebih efektif ketimbang legislatif. Karena eksekutif memiliki mekanisme membuat undang-undang mandiri tanpa DPR melalui PERPPU, sementara DPR tidak bisa.

"Jadi kalau pemerintah sudah mempunyai kemauan, biasanya UU-nya cepat. Misalnya RUU KUHP, ini kan karena belum selesai di pemerintah, antara Polisi, Jaksa dengan KPK. Jadi mari kita ubah mindset-nya. Kita minta pemerintah agak serius, politik legislasinya di pidatokan

seperti pidato Nota Keuangan tanggal 16 Agustus," tutup politisi asal dapil NTB itu.

Sementara itu pengamat politik Hendri Satrio menilai, tidak salah jika menilai kinerja DPR berdasarkan kuantitas. Karena paling mudah untuk menilai kepercayaan dari publik, adalah dengan melihat kuantitas legislasi yang dihasilkan DPR. Karena jika melihat dari sisi kualitas, akan sulit diukur.

"Kalau kepercayaan publik naik, artinya ada apresiasi publik terhadap kinerja DPR. Sehingga hitungannya tidak kuantitatif saja. Kinerja DPR sekarang bagus atau tidak, berapa undang-undang yang berhasil diselesaikan. Tapi kan bukan hanya satu fungsi saja, tetapkan ada fungsi-fungsi yang lain yang sebetulnya harus diukur," jelas Hendri.

Hendri menambahkan, terkait kepercayaan publik itu, Anggota DPR juga tidak tersandera harus menyelesaikan jumlah UU dalam satu periode tetapi ada fungsi lain yang harus diperhatikan dan dijalankan.

"Misalnya aspirasi publik. Itu bisa juga dijadikan ukuran kinerja, dari tidak selalu hitung-hitungannya adalah kuantitas. Kasihan juga Anggota DPR, dianggap tidak bekerja, karena hitungannya kuantitas dari UU. Kalau menurut saya, jika ingin menampilkan dari sisi kualitas, Anggota DPR mesti siap, dinilai dari awal kemudian pada akhir tugasnya," tutupnya. ■

(sf), Foto: Rumihtr



Miliki Pusat Penelitian Kunci Pemanfaatan Panas Bumi

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengatakan, kesuksesan Islandia dalam mengembangkan sumber Panas Bumi adalah karena didukung oleh pusat penelitian berkelas dunia yang bergerak di bidang energi Panas Bumi. Menurutnya, memiliki pusat penelitian yang hebat adalah kunci pemanfaatan panas bumi.

“Di Islandia, penelitian tentang Panas Bumi telah dimulai sejak tahun 1945 dibawah Instansi pemerintah. Kini, Islandia Geo Survey melanjutkan penelitiannya sebagai lembaga negara independen,” ujar Agus dalam sambutannya saat meninjau Iceland Geo survey (ISOR), di Islandia, Rabu, (09/8/2017).

Oleh karena itu, lanjut Agus, memiliki pusat penelitian yang hebat adalah kunci untuk memperbaiki pemahaman mengenai Panas Bumi serta dapat menurunkan tingkat risiko dalam kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan pemanfaatan.

Dia menambahkan, pemerintah Islandia tengah menjalankan program pengeboran. dalam rangka membantu Indonesia mempercepat pengembangan Panas Bumi. Pada tahap awal, program ini berfokus pada kegiatan eksplorasi sampai dengan pengeboran eksplorasi yang kemudian data yang diperoleh dari kegiatan ini akan menjadi dasar dokumen tender Wilayah Panas Bumi (GWA).

“Kami yakin akan ada proses pembelajaran untuk semua institusi yang terlibat dalam program tersebut, seperti Direktorat Jenderal Konservasi Baru, Terbarukan dan Energi, Badan Geologi, dan PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI). selain itu, Kami juga berharap, semua anggota yang terlibat dalam program ini akan menjadi ahli nasional yang terbentuk sebagai Pusat Riset Panas Bumi Indonesia ke depannya, serupa dengan ISOR pada periode 1970-1980,” papar Agus

Dia menambahkan, tujuan dari kunjungan ini adalah untuk belajar bagaimana Pemerintah Islandia mengelola pusat penelitian dalam mengembangkan Panas Bumi dan memaksimalkan penggunaan energi Panas Bumi (langsung dan tidak langsung). ■

(si). Foto : Sugeng/hr



Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto memberi sambutan di ISOR, Islandia

PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI
PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH
Achmad Djuned, S.H., M.Hum. (Sekjen DPR RI)
WAKIL KETUA PENGARAH
Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Persidangan)
PIMPINAN PELAKSANA
Drs. Djaka Dwi Winarko, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)
PIMPINAN REDAKSI
Drs.Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)
WK. PIMPINAN REDAKSI
Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak),
Ahyar Tibi, S.H (Kasubag Media Analisis),
Nita Juwita, S.Sos (Kasubag MedSos dan Website)
REDAKTUR
Mastur Prantono, Suciati, S.Sos
SEKRETARIS REDAKSI
Hasri Mentari, Guntur Dewanto
ANGGOTA REDAKSI
Agung Sulistiono, SH, Rahayu Setiowati, Muhammad Husen,
Sofyan Efendi, Virgianne Meiske Patuli, Devi Iriandi, Hendra
Sunandar, Surahmat Eko, Ria Nur Mega
REDAKTUR FOTO
Eka Hindra, Iwan Armanias
FOTOGRAFER
Rizka Arinindy, Supardi, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah,
Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana, Arief
Rachman, R. Kresno P.D Moempoeni, Akza Restu Fadilah
ADMINISTRASI FOTO
Bagus Mudjiharjanto
ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA
Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI
Gedung Nusantara II Lt. 3
Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta
Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341,
e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com, www.dpr.go.id/berita



PENERBITAN
PIMPINAN PENERBITAN
Djustiawan Widjaya, S.Sos. M.AP (Kabag Penerbitan)
PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)
STAF PRODUKSI
Subadri, S.E, Barliansyah,
Fathurahman, Abdul Kahfi, S. Kom
DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Drs. Karyanto (Kasubag Distribusi)
ADMINISTRASI
Sjaefudin, S.Sos
KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Mujiono
STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Arif, Lamin, Remon, Yuliana Puspita,
Ifan, Siti Rondiyah, Oji Saputra
Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421
Email : penerbitandpr@gmail.com

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

ISI BERITA DAN MATERI FOTO DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN

Ketua DPR Ajak Generasi Bangsa Aktif Jaga Solidaritas

Tanggal 8 Agustus 2017, ASEAN memperingati hari lahirnya yang ke-50. Sejak didirikan pada 8 Agustus 1967, ASEAN mempunyai tujuan mulia meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya, memajukan perdamaian dan stabilitas di tingkat regional, serta meningkatkan kesempatan untuk membahas perbedaan diantara anggotanya dengan damai.



Ketua DPR RI, Setya Novanto

depan ASEAN. Bahkan beberapa pandangan memperkirakan ASEAN akan 'layu sebelum berkembang'. Namun, sejarah membuktikan sebaliknya. Kini ASEAN telah menjadi kawasan kedua yang paling berkembang setelah Uni Eropa.

"ASEAN bukan tanpa tantangan. Perselisihan Laut Cina Selatan yang belum tuntas, serta persaingan yang sangat ketat antara Amerika dan China turut menjadi ancaman bagi stabilitas ASEAN. Ditengah perkembangan geopolitik internasional yang

penuh dinamika, seperti Inggris keluar dari Uni Eropa dan krisis diplomatik di Kawasan Teluk yang tak kunjung selesai, ASEAN justru semakin menunjukkan stabilitas kesatuan. ASEAN aktif menjadi embrio perdamaian dunia yang mampu menciptakan kemakmuran bagi warganya," paparnya.

Dalam ASEAN, lebih kurang 640 juta jiwa dengan berbagai perbedaan agama maupun kebudayaan. Di kawasan ini hidup dengan damai 240 juta muslim, 120 juta kristiani, 150 juta umat Budha, dan jutaan

umat Hindu, Khonghucu, dan lainnya, lanjut Novanto.

"Stabilitas kawasan telah mendorong laju perekonomian negara-negara ASEAN. Data International Monetary Funds (IMF) menunjukkan pendapatan domestik bruto (PDB) gabungan negara ASEAN pada awal masa berdiri di tahun 1970 mencapai 95 miliar US dollar. Kini sudah menjadi 2,7 triliun US dollar. Bahkan, pada 2030 diprediksi mencapai 8 triliun US dollar," ujarnya.

Ia juga menyatakan bahwa sejak awal pendirian ASEAN, Indonesia telah menjadi pemain kunci. Indonesia menjadi penggagas perlindungan hak asasi manusia, pembentukan komunitas keamanan se-Asia Tenggara, serta mewujudkan pagelaran budaya secara berkala.

"Saya mendukung langkah politik internasional pemerintahan Jokowi - JK untuk tetap menjadikan Indonesia poros kekuatan ASEAN yang memberikan solusi bagi berbagai permasalahan dunia. DPR RI melalui peran Diplomasi Parlemen juga akan seiring sejalan dengan pemerintah Indonesia dalam mendorong ASEAN agar lebih efektif dan kooperatif dalam membangun kerjasama perekonomian, sehingga bisa memperkecil jarak kesenjangan pendapatan dan mengurangi disparitas ekonomi di dalam ASEAN," pungkasnya. ■

(dep.mp), Foto: Jaka/hr

“Di hari jadinya yang ke 50 ini, saya mengajak kaum muda Indonesia sebagai generasi penerus bangsa untuk aktif menjaga solidaritas kebersamaan. ASEAN sebagai sebuah kawasan adalah rumah kedua kita. Persaudaraan antar sesama negara ASEAN harus terus dijaga. Dari sinilah perdamaian dunia tercipta,” ucap Novanto dalam rilisnya, Selasa (08/8).

Novanto mengatakan, pada awal berdiri, tak sedikit yang meragukan masa

Napi Lapas Ambon Curhat Kepada Komisi III DPR

Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Ambon memanfaatkan kedatangan Tim Komisi III DPR RI untuk berbagi kisah terkait keadaan lapas.

Tujuan Tim Komisi III DPR mengunjungi Lapas Kelas IIA Ambon ini, guna mengecek keadaan lapas dari aspek keamanan hingga pembinaan. Sekitar satu jam, Tim Komisi III melihat dari dekat Lapas tersebut, Tim juga meninjau UPT Lapas Anak dan Perempuan, ruang keterampilan, dan ruang-ruang tahanan.

Ketua Tim Kunker Komisi III Desmond Junaidi Mahesa pun merespon aspirasi



tersebut. Ia berjanji akan menindaklanjutinya dalam rapat dengan pemerintah pusat. "Untuk itu kami datang ke sini. Salah satunya agar bisa mendapat informasi dan mendengar langsung apa yang menjadi keluhan warga binaan". jelasnya di Maluku, Senin (07/8/2017)

"Pak kami minta keadilan agar ditegakkan," kata warga binaan kasus tindak pidana korupsi (tipikor). Ia meminta Komisi III DPR membantu mereka, agar Peraturan Pemerintah (PP) no.99 tahun 2012 terkait hak warga binaan napi tipikor ditinjau ulang.

Menanggapi hal ini, Desmond mengatakan, salah satu alasan untuk merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan adalah dikarenakan menghukum orang dua kali pada saat napi sudah dinyatakan bebas dia harus memenuhi syarat-syarat tambahan dan itu tidak boleh keluar dengan tidak boleh keluar napi itu dihukum lagi. "Dalam ilmu hukum itu tidak boleh. Komisi III DPR RI sepakat agar presiden segera mencabut PP tersebut," tegas Desmond. ■



(sandy), Foto: Andri/hr

Ketua Tim Kunker Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa saat memberikan keterangan di lapas kelas I A. Ambon

DPP PKS Laporkan Viktor Laiskodat ke MKD

Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS), diwakili oleh Ketua Departemen Hukum dan HAM DPP PKS Zainudin Paru melaporkan Anggota DPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR RI Viktor Bungtilu Laiskodat ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR, Senayan, Jakarta, Senin (7/8/2017).

Zainudin menjelaskan, laporan itu mengenai pernyataan Viktor di Kupang, Nusa Tenggara Timur baru-baru ini, yang menyinggung Partai Gerindra, Demokrat, PKS dan PAN terkait khilafah dan PKI berpotensi

menimbulkan konflik dan permusuhan di tengah masyarakat. PKS meminta MKD agar Viktor segera diproses secara etik.

"Pengaduan kami meminta agar dia (Viktor) segera dipanggil kemudian diperiksa. Dan meminta MKD memecat, jika

memang dugaan itu terbukti melanggar kode etik dan sumpah jabatan sebagai Anggota DPR RI," tegas Zainudin.

Ia menambahkan, pihaknya akan mengikuti mekanisme yang ada dan administratif di MKD setelah mengadakan Viktor. Pihaknya mendesak supaya Viktor segera dipanggil untuk dimintai keterangannya.

"Dan meminta MKD memecat jika memang dugaan itu terbukti melanggar kode etik dan sumpah jabatan sebagai Anggota DPR RI, lebih cepat lebih baik," imbuhnya.

Dalam laporan itu, ia menyertakan media penyimpanan data atau flashdisk berisi rekaman video pernyataan Viktor, baik versi panjang berdurasi sekitar 25 menit maupun yang durasi singkat, 2 menit 3 detik.

"Kami minta hukuman yang setimpal terkait dengan pelanggaran kode etik, paling tidak ini mengganggu dan mengancam stabilitas persatuan dan kesatuan dan kedamaian secara nasional. Kami minta masalah copot atau tidak dari ketua fraksi, tapi kami minta diberhentikan dari Anggota DPR RI," tegasnya.

Tak berselang lama, Generasi Muda Demokrat juga melaporkan hal yang sama. Wakil Ketua Umum Generasi Muda Demokrat N Primawira mengatakan, selain melapor ke MKD pihaknya berencana melakukan somasi ke Viktor. Dalam laporannya ke MKD, tuntutan yang diajukan pun sama dengan PKS, yakni mendapat sanksi etik. ■

(sf), Foto: Kresna/hr



Ketua Departemen Hukum dan HAM DPP PKS Zainudin Paru



Tim Kunker Komisi V DPR meninjau Terminal Pelabuhan Tulehu di Pulau Seram, Maluku

Penambahan Terminal Pelabuhan Tulehu Atasi Lonjakan Penumpang

Tim Kunker Komisi V yang dipimpin Michael Wattimena didampingi Dirjen Kelautan meresmikan terminal Pelabuhan Tulehu sekaligus membagikan life jacket kepada masyarakat sekitar. Penambahan terminal Pelabuhan Tulehu bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menampung lonjakan penumpang di Pulau Seram, Saparua, Nusa Laut, Haruku dan Banda.

Michael Wattimena memberikan apresiasi atas pengembangan konektivitas serta peningkatan sarana dan prasarana di Maluku khususnya dan pengembangan proyek strategis Kementerian Perhubungan pada umumnya. “Saya memberikan apresiasi atas pengembangan sarana dan prasarana di Maluku,” ujar Michael di sela-sela kunker tersebut baru-baru ini.

Menurut politisi Demokrat ini, dengan adanya penambahan terminal di pelabuhan Tulehu, lonjakan penumpang serta kegiatan ekonomi mengangkut hasil bumi dari pulau-pulau sekitar tiap hari melalui Pelabuhan Tulehu, kini bisa teratasi “Posisi Pelabuhan Tulehu sangat strategis dan menjadi konektivitas pulau



Potensi Ancaman Keamanan di Sulut Besar

Komisi III DPR RI akan memulai rangkaian Kunjungan Kerja (Kunker) ke Sulawesi Utara (Sulut). Kunker tersebut mencoba menggali masukan potensi ancaman keamanan apa saja yang terjadi di wilayah Kepolisian Daerah (Polda) Sulut



Anggota Komisi III DPR, Wenny Warouw

“Hakekat ancaman Polda Sulut itu cukup serius terutama di bidang terorisme, narkoba maupun masalah-masalah korupsi dan pengawasan orang asing,” kata Anggota Komisi III Wenny Warouw (F-Partai Gerindra), di Kota Manado, Minggu (06/08/2017).

Wenny mengutarakan bahwa dalam Kunker ini Komisi III juga akan mendalami informasi terkait bagaimana Kepolisian, Kejaksaan dan mitra kerja lainnya yang akan dikunjungi dalam menangani masalah-masalah korupsi yang menonjol di wilayah Sulut.

“Ada perkara-perkara korupsi yang berjalan di tempat, tidak ditangani sudah bertahun-tahun, kemudian masalah tahanan terkait korupsi yang kecil-kecil mereka ada di mana karena informasinya mereka sepertinya kok enak-enak dibilang vonis gak taunya ada di luar. Itu banyak laporan yang seperti itu,” ungkapnya.

Yang kedua, masalah narkoba, itu juga marak di sini, bahkan belum lama Kapolri meninjau ke Sulut dalam rangka menggali masukan terkait penanganan narkoba di wilayah tersebut.

Yang terakhir masalah teror, menurutnya, Manado, Sulawesi Utara menjadi seperti tempat transitnya orang dari Filipina Marawi kemudian masuk Poso dan Ambon melalui Manado. “Ini yang akan Komisi III tanya kepada Kapolda terutama bagaimana pengawasan terhadap lintas batas negara ini,” katanya.

Wenny mempertanyakan pengawasan Pemerintah Filipina kenapa bisa lolos oknum warganya berkeliaran di wilayah Indonesia. “Kita ingin tahu bagaimana pengawasan dari

Filipina mereka bisa masuk ke Sulawesi Utara melalui pulau-pulau yang kecil di daerah Sangihe Talaud,” paparnya.

Menurutnya, banyak sekali pelabuhan-pelabuhan yang susah di jangkau dikarenakan fasilitas minim. “Polda disini punya alat, tapi tidak punya kapal yang memadai untuk masuk ke tempat-tempat seperti itu,” katanya.

Jadi hal tersebut menjadi perhatian dari Komisi III DPR untuk memprioritaskan anggaran ke depannya. “Itu bisa juga diajukan untuk Polda Sulawesi Utara yang sudah menjadi tipe A. Sesuaikanlah kebutuhannya itu, karena hakekat ancamannya itu serius di sini,” paparnya.

Lebih lanjut, Wenny menjelaskan, banyak sekali orang-orang cina yang ingin masuk Manado, dengan menggunakan visa turis kemudian mereka tidak balik lagi kenegaranya. “Mereka banyak yang tidak balik lagi dan kerja di hutan-hutan, di tambang-tambang emas dan di banyak sektor lainnya. itu juga akan digali sejauh mana pengawasan orang asing oleh pemerintah daerah,” jelasnya.

Wenny mengharapkan, pemerintah pusat, Pemda dan seluruh mitra kerja Komisi III, Polda dapat melaksanakan tugasnya sesuai program yang direncanakan dan peraturan UU yang berlaku di Indonesia. “Kita mengharapkan jangan sampai ada kekisruhan dan ada kegaduhan,” tegasnya.

Selain itu terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dikatakannya bahwa Kapolri saat rapat kerja dengan Komisi III DPR sudah menjanjikan akan membuat Satgas Densus Tipikor. “Nah kita mau melihat bagaimana reaksi dari Polda dalam rangka melihat dan menanggapi Ide ini. Apa mereka sudah membuat embrio-embrio persiapan untuk menjadi Satgas Densus Tipikor. Itu harus kita tanya besok apa sudah sampai kepada Polda terkait Kapolri punya maksud dan tujuan,” imbuh Wenny Warouw. ■

pulau sekitarnya dan penambahan Terminal Pelabuhan Tulehu yang baru ini diharapkan mampu mempermudah akses masyarakat sekitar,” ujarnya.

Pelabuhan yang menghubungkan Pulau Seram, Saparua, Nusa Laut, Haruku dan Banda kini tampak rapih dan siap digunakan meskipun masih perlu perbaikan di sektor air bersih. Sehingga ke depan diharapkan Pelabuhan Tulehu bisa dimanfaatkan oleh penumpang yang akan berlayar atau transit. Dirjen Kelautan Tonny Budiono pun berharap sinergitas yang baik antara Komisi V dengan Kemenhub dapat terus dilanjutkan. ■

(ds.mp), Foto: Doeh/ir

(es), Foto: Agung/ir

Komisi VI DPR Tinjau Pasar Pandansari

Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI ke Provinsi Kalimantan Timur dipimpin Wakil Ketua Komisi VI Azam Azman Natawijaya meninjau Pasar Pandansari di Balikpapan. Tim berdialog dengan pedagang dan masyarakat. Mereka mengharapkan agar pemerintah segera merenovasi Pasar Pandansari.

Pasar Pandansari merupakan pasar induk yang terbakar dua kali di tahun 2015. Demikian padatnya, saat ini pedagang di Pasar Pandansari berjalan hingga ke luar area pasar.

“Kami sudah melihat dan meninjau, Pasar Pandansari ini merupakan pasar pasar induk dan pasar retail. Pasar ini sudah terbakar dua kali di tahun 2015. Informasi dari Walikota Balikpapan, pasar ini sangat berkembang pesat dari

segi ekonomi, sehingga penjual melebar ke luar area pasar,” kata Azam, Selasa (08/8/2017)

Ia menyarankan agar pasar induk di Pandansari dipindahkan, dan sebagian pasar ini direnovasi untuk menjadi lahan parkir. Sehingga orang yang ingin berbelanja di pasar bisa langsung parkir di lantai tiga gedung pasar tersebut.

Menurut politisi Demokrat ini, lantai tiga Pasar Pandansari nantinya akan hidup seperti pasar-pasar di Jakarta.

“Terkait adanya permohonan bantuan dari Walikota Balikpapan, akan kami bicarakan dengan Menteri Perdagangan. Mudah-mudahan ada APBN bisa disalurkan ke Balikpapan,” imbuhnya.

“Untuk tahun lalu tidak ada anggaran dan semoga tahun ini bisa terealisasi anggarannya. Kita berdoa saja, warga dan pedagang juga bantu dengan doa semoga ekonomi kembali membaik dan pemerintah pusat memiliki dana untuk merenovasi pasar ini,” pungkasnya. ■

(hr), Foto: Eka hindra/hr



Wakil Ketua Komisi VI Azam Azman Natawijaya meninjau Pasar Pandansari di Balikpapan



BNPB Diusulkan Jadi Kementerian Teknis

Wilayah Indonesia sebagian besar berpotensi mengalami bencana. Terutama musibah kebakaran hutan dan lahan (karhutla), potensi ini akan selalu muncul selama masih ada lahan gambut, khususnya di Sumatera Selatan, Riau dan Jambi yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari areal gambut.



Anggota komisi VIII DPR Achmad Mustaqim saat kunjungan kerja di Sumsel

Sisi lain, selama ini penanganan bencana kabut asap yang disebabkan kebakaran lahan dan hutan masih ditangani secara parsial dan lintas sektor. Sehingga muncul gagasan untuk membentuk suatu koordinasi yang strategis dengan membentuk Kementerian Teknis Kebencanaan.

Hal tersebut mengemuka dalam kunjungan kerja komisi VIII ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah

(BPBD) Provinsi Sumatera Selatan, di Palembang, baru-baru ini.

“Kami mengusulkan BNPB menjadi kementerian teknis agar punya komando yang jelas, karena resiko bencana di Indonesia semakin banyak dan variatif,” ungkap anggota komisi VIII Achmad Mustaqim.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, pembentukan kementerian tersendiri yang khusus menangani bencana diperlukan sehingga ada garis

komando yang langsung ke bawah. Mengingat, BNPB tidak memiliki jalur komando langsung kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Di Sumsel sendiri, sambungnya, ada banyak titik hotspot yang berpotensi terjadi kebakaran. Karena itu, perlu adanya antisipasi dan mitigasi terhadap bencana.

“Sebab itu, harus ada gerak cepat yang sifatnya komando langsung, yang paling masuk akal adalah kementerian teknis. Karena selama ini, masih ditangani badan selalu berbalik dari kalimat koordinasi-koordinasi, akibatnya seolah-olah lempar tanggung jawab. Itu yg ditengarai oleh komisi VIII, sehingga dari awal kita coba mendorong menjadi kementerian teknis,” jelas politisi PPP ini.

Dia juga menekankan, sama seperti halnya masalah sosial, kebencanaan harus terintegrasi di pusat, tidak parsial. Sebab, masing-masing badan atau kementerian terkait mempunyai regulasi dan cara pandang dalam menanggapi bencana.

“Selain itu, kalau ini menjadi kementerian teknis akan mempunyai kelebihan yaitu, alokasi anggaran terpisah, dan punya aparatur yg sifatnya komando sehingga bisa cepat mengambil keputusan. Mudah-mudahan ini bisa terus berkembang dan menjadi rencana perbaikan membuat keputusan bisa segrea. Mudah-mudahan itu bisa terus berkembang dan menjadi rencana perbaikan UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana,” tandasnya.

Terkait persoalan anggaran, sebelumnya Kepala BPBD Sumsel Iriansyah mengatakan, dana siap pakai sangat dibutuhkan, namun ada proses yang memperlambat saat pencairan. Untuk itu, pihaknya mengusulkan agar ada ploting alokasi dana tiap provinsi di awal tahun anggaran agar setiap saat dibutuhkan bisa segera cair. Selain itu, masalah pembukaan lahan oleh petani dengan cara membakar lahan seharusnya mendapat perhatian khusus kementerian terkait. Agar meminimalisir kebakaran hutan dan lahan.

“Saran kami untuk penguatan BPBD di daerah, mohon dukungan pusdalops kabupaten yang rawan karhutla. Saat ini ada 5 kabupaten yang menjadi prioritas, yakni kab. Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Musi Banyuasin, Banyuasin dan Muara Enim,” kata Iriansyah. ■

(ann). Foto: Anne/hr

Legislator Harapkan Pembangunan Jangan Hanya Terpusat di Bali Selatan

Kebijakan pembangunan yang selama ini mengejar pertumbuhan hendaknya dibarengi dengan pemerataan, jangan hanya terpusat di wilayah Bali Selatan dan mengabaikan kabupaten lainnya.



Anggota Komisi VI DPR, Gde Sumarjaya Linggih

Hal ini diungkapkan Anggota Komisi VI DPR Gde Sumarjaya Linggih saat pertemuan Tim Kunker Komisi VI dengan Direksi BUMN antara lain Garuda Indonesia, Angkasa Pura I dan Pelindo III di Hotel Inna Kuta, Bali, Selasa (08/08'2017).

"Kebijakan pemerintah daerah lewat moratorium pembangunan hotel di Bali Selatan hendaknya dijadikan dasar bahwacarryng capacity di Denpasar atau Badung sudah cukup padat," jelasnya.

Politisi asal Dapil Bali ini mengatakan, kesalahan pembangunan semasa Orde Baru (Orba) yang hanya mengandalkan pertumbuhan namun mengabaikan pemerataan hendaknya segera dijadikan evaluasi para pengambil kebijakan. Jika terus mengejar pertumbuhan ekonomi tentunya akan melahirkan inflasi dan harga-harga barang turut melonjak.

Dia mempertanyakan, apakah hal itu mampu diikuti dengan pendapatan masyarakat. Kalau tidak mampu hal itu sebagai bentuk kemiskinan masyarakat. Dalam kondisi seperti itu, maka para pengusaha atau orang kaya konglomerat yang bertahan mengambil peranan. Sebaliknya, masyarakat setempat atau

lokal tersingkir. "Apa yang terjadi menjual rumah dan tanahnya karena itu yang paling gampang untuk bermigrasi ke daerah lain, maka itulah yang disebut marginalisasi masyarakat setempat," pungkas Linggih.

Itulah akibat tidak adanya pemerataan pembangunan di daerah yang sudah cukup padat dengan berbagai problem sosial kemasyarakatan seperti di Bali Selatan. Belum lagi masalah migrasi masyarakat dan perbedaan masyarakat yang kaya dan miskin semakin melebar.

Karena itu, sudah saatnya pemerintah memikirkan pemerataan pembangunan di beberapa wilayah Bali lainnya, seperti Karangasem di Bali Timur dan Bali Utara seperti Buleleng dan Bangli. "Harus ditentukan skala prioritasnya mana yang segera dibangun, apakah daerah-daerah Timur, Utara atau Barat, yang penting untuk pemerataan pembangunan," tutup Sumarjaya Linggih. ■

(i/w.mp), Foto: Iwan/hr

Program BLK Harus Sesuai Kebutuhan Dunia Kerja

Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi berharap, Menteri Ketenagakerjaan memperhatikan jenis pelatihan yang ada di Balai Latihan Kerja (BLK) agar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja (Link and match), sehingga daya serapnya bisa mencapai 70 persen.



Tim Kunker Komisi IX DPR meninjau BLK di Entikong, Kalbar



Penetapan Target Pajak Daerah Tidak Transparan

Pemerintah pusat yang selama ini menetapkan target raihan pajak untuk setiap Kanwil Pajak di daerah, dinilai tidak transparan. Setiap daerah punya kondisi kekayaan dan kondisi berbeda-beda yang harus dijadikan dasar penetapan perolehan pajak.

Demikian disampaikan anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan usai mengikuti pertemuan dengan para mitra Komisi XI di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Selasa (01/8/2017). "Kita ingin lihat di Banjarmasin bagaimana mereka mendapat target untuk raihan pajak. Sampai Semester I 2017 capaiannya baru 31 persen. Kenapa bisa seperti ini. Ternyata target pajak ditetapkan oleh pusat secara sepihak kepada Kanwil Pajak Daerah," ungkap Heri.

Dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, berbunyi, "APBN disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara". Yang salah satunya, pendapatan diperoleh dari pajak.

Seperti kita ketahui, tax ratio (Tax To GDP Ratio) sejak tahun 2014 sampai 2016



Anggota Komisi XI DPR, Heri Gunawan

terus mengalami penurunan dan baru pertama kali dalam sejarah, pemerintah mengajukan rencana Belanja Negara TA 2017, namun pemerintah sendiri tidak yakin dengan yang diajukan.

Dijelaskannya, dari sejak dulu sampai sekarang daerah hanya bisa menerima

penetapan target tanpa punya hak koreksi. Dan raihan pajak daerah ini akan dijadikan dasar untuk penyusunan APBN. Bila target pajak dari setiap daerah tidak tercapai, maka APBN akan direvisi, dan menjadikan APBN ada ketidakpastian pendapatan, bahkan dianggap tidak kredible. "Saya pikir ini sebuah kebijakan pusat yang kurang baik. Akan lebih baik bila tiap daerah diberi kepastian berapa target pajak yang memang harus dan dapat mereka peroleh berdasarkan kondisi regional masing-masing," ujar politisi Partai Gerindra ini.

Persoalannya, sambung mantan Wakil Ketua Komisi VI itu antara lain, tidak semua perusahaan multinasional pengelola sumberdaya alam di Kalimantan bisa langsung diambil pajaknya, karena para pengusahanya memiliki NPWP di Jakarta (pusat)

"Kebijakan penetapan target pajak di daerah nampaknya perlu dievaluasi guna kepastian pendapatan. Jadi bukan hanya ditetapkan oleh pusat, tapi dari daerah akan menghasilkan berapa berdasarkan kondisi atau analisa data base termasuk tax ratio yang selama ini ada dan sedang terjadi," imbuhnya. ■

Terlebih, lanjut Dede, daerah perbatasan yang merupakan pintu masuk bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk bisa bekerja di negara lain. "Kita berharap Kemenaker ke depan membuat jenis pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri, agar daya serpanya tinggi, apalagi di Kabupaten Sangau, Entikong yang merupakan perbatasan dengan Malaysia ini," jelas Dede di Entikong, Kalimantan Barat, Senin (31/07/2017).

Lanjut Dede, selain jenis pelatihannya yang harus sesuai dengan dunia kerja, Pelatih juga merupakan kunci bagi para calon pekerja Indonesia untuk meningkatkan kemampuan, sehingga yang bekerja di sektor informal bisa menjadi pekerja formal. "Khusus di Sarawak saja TKI kita ada 300 ribu, tapi mayoritas mereka masih bekerja di sektor informal," kata Dede.

Masih kata Dede, hal itu merupakan tugas negara untuk meningkatkan kemampuan para pekerja melalui

pendidikan vokasional di BLK. "Ini tanggungjawab negara untuk memberikan ruang kepada saudara-saudara kita yang tidak masuk ke sekolah formal tetapi ingin bekerja di sektor formal melalui pendidikan vokasional di BLK, dengan jenis pelatihan yang sesuai dan menghadirkan pelatih, " pungkasnya.

Hal senada disampaikan anggota Komisi IX DPR Okky Asokawati, dia merasa BLK yang ada selama ini masih tidak sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga serapannya hanya sedikit. "BLK disini sama saja seperti yang lain, tidaklink and match antara jenis pelatihan yang dibuat dengan yang dibutuhkan industri," ungkapnya.

Maka dari itu, Okky berharap, Kementerian Ketenagakerjaan, kedepan bisa melakukan kerjasama dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Industri, Kemendikbud, dan Dinas yang ada di sekitar, sehingga output yang dihasilkan dapat terserap dengan maksimal.

Hal lain, yang menjadi perhatian politisi partai PPP itu mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bidang Ketenagakerjaan yang belum sepenuhnya melindungi para pekerja pada sektor Informal di Entikong.

"BPJS Ketenagakerjaan di Entikong, tidak menggarap hampir semua para pekerja, karena tidak adanya personil yang menjangkau ke daerah perbatasan. Padahal sesuai himbuan Jokowi harus ada pembangunan di perbatasan, harus diprioritaskan, kalau tidak berarti negara tidak hadir untuk melindungi. Ini akan dibahas saat rapat kerja," ungkapnya.

Kunjungan kerja ini juga diikuti oleh anggota Komisi IX lainnya, diantaranya Imam Suroso (PDI-P), Betti Shadiq Pasadigoe (F-Golkar), Khaidir Abdurrahman (F-Gerindra), Aliyah Mustika Ilham (F-Demokrat), Hang Ali Saputra (F-PAN), Marwan Dasopang (F-PKB), Irgan Chairul MAhfiz (F-PPP). ■



Tim Kunker Komisi X DPR saat meninjau Kampung Raja Pralu, Sumba Timur



Pariwisata Sumba Belum Terekspose

Komisi X DPR RI menyayangkan belum tereksposnya pariwisata daerah Sumba, khususnya Sumba Timur dibanding daerah lainnya di Nusa Tenggara Timur. Hal tersebut terungkap saat Komisi X meninjau Kampung Raja Praliu, Sumba Timur, Senin (31/7/2017).

“Banyak sekali keunikan dan kekhasan yang ada di Sumba yang bisa dijadikan obyek wisata, namun belum terekspose. Salah satunya Kampung Raja Praliu di Sumba Timur ini. Rumah adat yang berbentuk rumah panggung berinding papan dan beratap rumbai-rumbai yang disusun menjulang tinggi ini dulu merupakan tempat tinggal raja-raja di Sumba. Sampai sekarang keasliannya masih terjaga, budaya dan nilai historisnya sangat tinggi. Tapi sayang tidak terekspose, tidak banyak orang yang tahu, sehingga belum banyak wisatawan yang datang ke tempat ini. Orang hanya tahu pariwisata NTT itu Flores, dan Pulau Komodo saja,” ujar anggota Komisi X DPR asal Dapil NTT, Anita Jacob Gah.

Tidak hanya itu, menurut Wakil Bupati Sumba Timur, Umu Lili Pekuwali dalam pertemuan dengan Komisi X DPR RI ini banyak potensi wisata alam yang tidak kalah dengan daerah lain.

Sebut saja Pantai Nikiwatu yang sangat cantik untuk dijadikan tempat berlibur yang menyenangkan. Belum lagi Pantai Tarembang yang sangat asik untuk dijadikan tempat bersurfing. Bahkan Sumba Timur juga memiliki budaya dan olahraga tradisional yang cukup menarik, yakni pacuan kuda. Tapi semua itu belum terekspose secara nasional, apalagi dunia.

Pada kesempatan itu senada dengan Anita, anggota Komisi X DPR, Junico Siahaan mengatakan perlu keseriusan dalam mengelola potensi wisata Pulau Sumba khususnya Sumba Timur yang sangat luar biasa itu. Harus ada promosi-promosi khusus atau event-event untuk mendatangkan wisatawan. Misalnya dengan mengambil seseorang yang terkenal (sebutlah artis) yang memiliki follower yang cukup banyak di media sosial untuk menjadi duta daerah tersebut. Duta itulah yang nantinya akan terus menerus mengekspose foto-foto dan video tentang pariwisata daerah tersebut.

“Dan yang juga tidak boleh terlupakan adalah untuk meningkatkan wisatawan adalah dengan meningkatkan kesadaran berbudaya dan pariwisata masyarakat sekitar. Artinya jangan lupa juga untuk mengekspose kuliner khas daerah tersebut. Karena sesungguhnya rasa itu tercipta tidak hanya dari mata, melainkan juga melalui mulut. Disinilah peran ekonomi kreatif untuk membuat makanan yang bisa dijadikan oleh-oleh bagi wisatawan. Dengan Koordinasi Kementerian Ekonomi Kreatif dan Dinas Pariwisata untuk promosinya serta dukungan serius dari pemda setempat, saya yakin wisatawan akan banyak berdatangan dan pariwisata daerah ini pun akan sangat berkembang,” papar Nico. ■





Tim Kunker Komisi X DPR dipimpin Ketua Komisi X Teuku Riefky Harsya saat kunjungan Aceh

Potensi Wisata Syariah Aceh Belum Eksis

Potensi pariwisata di Aceh diakui memang sangat banyak. Aceh memiliki garis pantai yang cukup panjang, kuliner dan aktivitas budaya yang sangat menarik. Aceh juga mempunyai keunikan tersendiri dibandingkan daerah lain, dimana Aceh mempunyai potensi wisata syariah. Aceh bisa mengembangkan wisata halal yang merupakan kebutuhan bagi wisatawan muslim di dunia yang setiap tahunnya berkeliling dunia.

“Namun sangat disayangkan Aceh yang memiliki keindahan dan kekayaan alam yang luar biasa belum mampu menunjukkan eksistensi pariwisata syariahnya. Padahal jika dilihat dari potensi, fasilitas syariah dan destinasi wisata, Aceh memiliki potensi yang cukup

memadai dibandingkan dengan daerah lain,” kata Anggota Komisi X DPR RI Arzetty Bilbina Setyawan saat kunjungan kerja Komisi X DPR RI ke Aceh, baru-baru ini.

Selama kunker ke Aceh, komisi pariwisata ini meninjau sejumlah potensi

pariwisata di sana, diantaranya Museum Tsunami, Museum PLTD Apung, Pantai Lampuuk, Tugu 0 Kilometer, hingga beberapa titik yang akan menjadi lokasi Sail Sabang 2017.

Politisi F-PKB itu menilai, salah satu hal yang menjadi kendala adalah kurangnya perhatian pemerintah dalam mengupayakan terlaksananya pariwisata berbasis industri kreatif di daerah yang memiliki destinasi pariwisata cantik, seperti Pulau Weh, Sabang.

“Negara kita ketinggalan pesatnya dari Malaysia, Thailand, Korea Selatan, dan Jepang yang sudah lebih dulu menerapkan konsep wisata berbasis syariah. Padahal wisata syariah atau wisata religi merupakan ciri khas yang jarang daerah lain miliki,” imbuh Arzetty.

Arzetty menambahkan, saat ini pariwisata syariah masih dimaknai sebagai wisata rohani. Pemahaman seperti ini diakibatkan oleh minimnya pencerdasan pariwisata syariah. Padahal, potensi pariwisata syariah semakin baik dengan tingkat pemahaman masyarakat yang lebih memilih pariwisata syariah.

Kemudian, dalam pengembangan pariwisata syariah, industri kreatif dapat memberikan ide terkait pelaksanaan perencanaan, publikasi, program, dan destinasi wisata yang ada sehingga menambah nilai jual pariwisata syariah.

“Tujuan menjadikan Aceh sebagai tujuan wisata halal bukan semata-mata untuk bisnis, akan tetapi murni perintah agama, mengingat Aceh merupakan daerah yang menerapkan syariat Islam. Jadi Aceh sangat potensial mengembangkan pariwisata syariah atau religi, sehingga mampu menjadi daya tarik wisatawan dunia, khususnya wisatawan muslim,” tutup politisi asal dapil Jawa Timur itu. ■

(sf), foto:sofyan/hr

Anwar Sanusi Keberadaan Pansus Perkuat KPK

Anwar Sanusi mantan Wakil Ketua Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) dengan tegas mengatakan, keberadaan Pansus Hak Angket KPK justru untuk memperkuat kinerja KPK. Kritik dan saran Pansus harus dipandang positif oleh KPK.

“Pansus ini, kan, untuk memperkuat kinerja KPK sendiri. Bukan untuk membubarkan. Kalau sudah efektif dan sudah berjalan sesuai sasarannya, ya sudah kembali ke (amanat) UUD 1945, yaitu kembali ke kejaksaan dan kepolisian,” terang Anwar kepada pers usai diterima Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa, Rabu (9/8/2017).

Sampai saat ini, kata Anwar, kerja para penegak hukum di kepolisian dan kejaksaan masih dipantau efektivitasnya.



Publik tak perlu alergi, ketika para penegak hukum di kejaksaan dan kepolisian sudah berjalan efektif terutama dalam memberantas korupsi, maka keberadaan KPK harus segera dikembalikan pada tatanan bernegara yang benar, yaitu dikembalikan seluruh fungsi dan kewenangannya ke lembaga penegakan hukum yang sudah ada.

“Kalau memang penegak hukum sudah efektif, istilahnya KPK bukan dibubarkan, tapi kembali lagi ke lembaga semula. Kalau sudah efektif, ya sudah tidak dipakai lagi. Tapi, sementara belum efektif, KPK masih kita dukung terus,” papar Anwar lagi. Pencegahan korupsi, lanjut Anwar, harus diaktifkan sebelum, selama, dan sesudah para penyelenggara negara itu menjabat.

Bagaimana pun KPK tetaplah lembaga



Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa bersama Anwar Sanusi mantan Wakil Ketua KPKPN

ad hoc (bersifat sementara). Sebagai lembaga yang menangani kejahatan luar biasa, KPK harus memadukan secara seimbang antara pencegahan dan pemberantasan. “KPK dibentuk bukan untuk menangkap maling, tapi bagaimana

penyelenggara negara bisa menciptakan good government dan clean government. Bukan tangkap sana sini, tapi ada golnya bahwa suatu saat penyelenggara negara di Indonesia itu bisa bersih dan bebas dari KKN,” imbuhnya. ■

(mh,mp), Foto: Arief/hr

DPR Parlemen Paling Terbuka Se-Asean

Koordinator Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Bernardo R. Agawin, sebuah penyedia jasa pengembangan teknologi untuk AIPA yang dinaungi lembaga swadaya Jerman, mengatakan DPR merupakan parlemen paling terbuka diantara negara Asia Tenggara (Asean).



Koordinator Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Bernardo R. Agawin

Dalam studi yang dilakukan pemerintah Jerman, Bernard menyampaikan Parlemen Indonesia menempati urutan pertama kategori parlemen tertransparan diantara parlemen negara kawasan. Sebab, dalam praktiknya, parlemen Indonesia sangat terbuka kepada stakeholdersnya.

“Kami mengukur bagaimana aspek transparansi dalam proses penganggaran, kami melakukan studi, dan ternyata Indonesia peringkat teratas karena memiliki praktik yang sangat terbuka, transparan kepada stakeholdersnya,” jelas pria asal Filipina ini.

Lebih lanjut, menurutnya, hal ini juga didukung dengan keterbukaan DPR RI terhadap perkembangan teknologi informasi. “Misalnya DPR punya media online dan TV Parlemen, sehingga masyarakat bisa mencermati apa yang sedang dibahas dan ke arah mana politik anggaran diarahkan,” sambungnya.

Sementara itu, masih dikemukakan dia, tujuan diadakannya AIPA Connect Roadshow ini sejalan dengan keinginan untuk mengintegrasikan negara Asean. Melalui AIPA Connect, sebagai platform elektronik, akan memfasilitasi jalur

komunikasi bagi user untuk memungkinkan pengguna belajar dan berbagi informasi. Sebagaimana tujuan AIPA untuk menggagas Asean Connectivity pada tahun 2025.

Hal senada diungkapkan Biro KSAP Endah Tjahjani Dwirini R., konektivitas menjadi hal yang signifikan, khususnya dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Menurutnya, platform AIPA Connect akan mempermudah tukar-menukar informasi. Tidak hanya tentang produk legislasi, tetapi jauh ke depan, masing-masing bisa mempelajari sistem parlemen tiap-tiap negara kawasan.

“Sebab itu, acara ini dihadiri teman-teman peneliti, Karena mereka sering terkendala mendapatkan bahan saat melakukan penelitian. Nah, dengan AIPA Connect, kita punya koneksi ke semua parlemen, sehingga bisa mempermudah kajian bagi peneliti dan tenaga ahli,” ungkap Endah.

Indonesia adalah negara ke-7 dari rangkaian AIPA Connect Roadshow. Sebelumnya, Sekretariat AIPA telah berkunjung ke negara AIPA lainnya, yaitu Manila, Hanoi, Bangkok, Na Pyi Taw, Phnom Penh dan Bandar Seri Begawan. ■

(ann), Foto : Arief/hr

Hal ini dinyatakan saat menjadi narasumber AIPA Connect Roadshow yang diselenggarakan Biro Kerja Sama Antar Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI bekerjasama dengan Sekretariat AIPA (Asean Inter-Parliamentary Assembly) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (09/8/2017).

Pelayanan Kesehatan di Wamena Perlu Ditingkatkan



Tim Kunker Komisi IX DPR RI di Wamena, Jayawijaya

Anggota Komisi IX DPR RI Marinus Gea mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk berkonsentrasi pada peningkatan pelayanan kesehatan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua. Minimnya fasilitas kesehatan serta tidak seimbang jumlah rumah sakit menjadi faktor yang perlu diperhatikan secara serius.

“Komisi IX mendorong peningkatan RS type C yang sudah ada itu dan disiapkan ruang perawatan yang layak,” demikian disampaikan Marinus usai meninjau RSUD Jayawijaya, Selasa, (01/08/2017).

Tentang tenaga medis yang menjadi kekurangan, Marinus meminta kepada Kemenkes untuk menyiapkan jumlah tenaga medis yang profesional untuk ditempatkan di Papua. Namun, perlu juga mengakomodasi anak-anak muda Papua untuk diutamakan menjadi tenaga medis.

“Tenaga medis jadi persoalan sendiri, kami minta Kemenkes untuk siapkan bagaimana mendorong tenaga medis yang profesional ditempatkan di sini.

Anak-anak daerah yang ingin jadi tenaga medis harus dibekali. Komisi IX juga mendorong itu,” tuturnya.

Politisi PDIP ini mengakui bahwa pelayanan kesehatan di Kabupaten Jayawijaya menjadi persoalan serius, alasan sulitnya transportasi menjadi faktor lambatnya distribusi alat-alat kesehatan untuk masuk ke rumah sakit di sekitaran Wamena.

“RS Vertikal kalau sudah jadi tapi belum ada tenaga medis ini jadi persoalan. Jayawijaya ini merupakan kabupaten yang jauh dari transportasi. Proses pembangunan ini sangat lambat dan mudah-mudahan di bidang kesehatan ini dapat dipercepat,” jelasnya.

Saat meninjau RSUD Jayawijaya

misalnya, ditemukan sejumlah kamar rumah sakit terpantau penuh sehingga menyulitkan rumah sakit untuk menerima pasien-pasien baru. Ini menjadi perhatian Komisi IX agar segera dicarikan solusi mengenai persoalan ini.

Terkait persoalan tersebut, politisi PDIP ini pun juga akan terus berkoordinasi dengan Menpan-RB untuk mendorong dibukakan peluang putera-puteri Papua dipekerjakan sebagai tenaga medis khusus rumah sakit di Provinsi Papua.

“Kita akan koordinasi dengan instansi terkait seperti Kemenkes dan juga kita dorong kepada Menpan untuk dibukakan peluang khususnya di Papua ini untuk tenaga medis dibuka secara luas untuk dipekerjakan di sini,” tutup Marinus. ■

(ns), Foto:Hendra/hr



Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR Pius Lustrilanang di RSUD Gabriel Manek Atambua v

Komisi IX Dukung Perbaikan Faskes RSUD Gabriel Manek Atambua

Komisi IX DPR RI mendukung perbaikan fasilitas kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mgr. Gabriel Manek Atambua yang merupakan rumah sakit rujukan regional di Atambua NTT.

Demikian disampaikan Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX Pius Lustrilanang usai meninjau langsung progres pembangunan gedung baru RSUD Mgr. Gabriel Manek Atambua NTT, Selasa (01/8/2017)

Sebagaimana diketahui, lanjut politisi Gerindra ini, RSUD Mgr. Gabriel Manek Atambua pada tahun 2016 memperoleh alokasi anggaran sebesar 30 miliar yang saat ini digunakan untuk membangun gedung baru tiga lantai dengan pengerjaan fisik baru mencapai

30 persen.

“Pembangunan dan pengembangan fasilitas kesehatan ini penting dan sudah mendesak sebagai salah satu syarat agar akreditasinya bisa meningkat dari tipe C menjadi tipe B,” ungkap Pius.

Hanya saja, politisi Dapil NTT I ini menyalangkan karena pada tahun 2017 ini ternyata RSUD Mgr. Gabriel Manek tidak lagi memperoleh anggaran seperti tahun sebelumnya.

“Kami ingin memastikan agar tahun depan bisa kembali memperoleh alokasi dana yang cukup untuk membangun gedung baru dan melengkapi berbagai fasilitas kesehatan sehingga target akreditasi B bisa tercapai,” tandas Pius.

Sementara itu mengenai capaian peserta JKN di Atambua yang baru mencapai sekitar 50% dari total penduduk, Wakil Ketua Komisi IX DPR ini berharap prosesnya bisa dipercepat agar target capaian 100% pada tahun 2018 bisa terpenuhi.

“Integrasi program Jamkesda dengan BPJS harus segera diselesaikan. Ada beberapa Bupati yang enggan melakukan hal tersebut karena Jamkesda menjadi program andalan mereka untuk mendapatkan manfaat politis dari program Jamkesda. Komisi IX DPR kapasitasnya hanya menjembatani pemda dengan BPJS,” tutup Pius Lustrilanang.

Sebelum meninjau pembangunan gedung baru RSUD Mgr. Gabriel Manek, Tim Kunker Komisi IX menggelar dialog dengan Bupati Belu Willybrodus Lay dihadiri Forkopimda Kabupaten Belu, Pimpinan OPD, Direktur RSUD Gabriel Manek dr Ansila dan para mitra kerja di Aula Betelalenok Kabupaten Belu, Atambua NTT. ■

(Naefituroji), Foto : Odjie/hr



sumber : <http://kupang.tribunnews.com>

Informasi Dana Nasabah Jangan Disalahgunakan

Perppu Nomor 1 Tahun 2017 mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan baru saja disahkan oleh DPR, oleh karenanya belum tampak reaksinya. Namun di sisi lain aparat pajak atau pihak perbankan harus dapat menjaga tingkat kerahasiaan informasi dana milik nasabah tersebut, agar tidak disalahgunakan atau dimanfaatkan untuk kepentingan lain secara illegal oleh pihak yang mendapatkan informasi itu.



Anggota Komisi XI DPR RI, Willgo Zainar

Demikian dikatakan Anggota Komisi XI DPR RI Willgo Zainar saat melakukan sosialisasi Perppu tersebut dalam kunjungan kerja Komisi XI DPR ke Provinsi Yogyakarta.

"Karena hal ini langsung berkaitan dengan nasabah, maka sedikit banyak pasti ada dampaknya. Kita tidak tahu secara persis reaksi pasar seperti apa, tetapi secara psikologisnya dapat berdampak pada masyarakat," ujar Willgo di Gedung Bank Indonesia Provinsi D.I. Yogyakarta, Senin (31/07/2017).

Willgo meminta agar pihak perbankan perlu melakukan langkah antisipasi terhadap berbagai kemungkinan yang terjadi. Kepercayaan masyarakat sebagai

penyimpan dana harus tetap dijaga, supaya maksud dari lembaga perpajakan yang ingin meningkatkan pendapatan pajak bisa tercapai, sehingga ekonomi dapat terus bergerak dan perbankan tidak mengalami kesulitan karena masalah likuiditas.

"Bagaimanapun juga, dana pihak ketiga ini cukup besar dibidang perbankan. Oleh sebab itu sosialisasi terhadap Perppu tersebut harus terus digalakkan, dan tingkat kerahasiaan dari informasi yang didapatkan harus bisa terjaga, supaya tidak terjadi permasalahan dikemudian hari," tegasnya.

Harus ada ketegasan dan kepastian hukum agar informasi itu benar-benar hanya digunakan untuk kepentingan perpajakan saja, tambahnya.

"Aparatur pajak dan pihak perbankan harus bersikap hati-hati, agar tidak terjadi kegaduhan dimasyarakat, khususnya penyimpan dana di perbankan. Kalau hal itu tidak bisa dikelola secara baik, maka dapat mendorong terjadinya rush. Nasabah yang merasa dirugikan akan menarik dananya dalam waktu tertentu," pungkasnya. ■

(dep), Foto : Ryan Dep/ht

Tiga Kesetjengan Berkoordinasi Siapkan Agenda Tahunan 16 Agustus

Dari tahun ke tahun, tiga lembaga negara MPR, DPR, dan DPD RI menggelar sidang tahunan bersama kementerian dan lembaga negara non kementerian. Sidang ini akan digelar pada tanggal 16 Agustus 2017 mendatang. Tiga Setjen yang berada di kompleks perlemen secara kompak meninjau kesiapan fisik Gedung Nusantara, yang akan digunakan agenda kenegaraan ini.



Sekjen DPR RI Achmad Djuned berdialog bersama Sekjen DPD Sudarsono Hardjosoekarto dan Sekjen MPR RI Ma'ruf Cahyono



Sekretaris Jenderal DPD RI Sudarsono Hardjosoekarto sebagai koordinator penyelenggara acara, didampingi Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono dan Sekretaris Jenderal DPR RI Achmad Djuned memberikan keterangan, bahwa ketiga kesetjanaan akan terus berkoordinasi melancarkan dan mensukseskan agenda kenegaraan ini.

"Nanti secara bertahap sampai hari H nanti akan terus koordinasi tiga kesekjenan, dan teman-teman kementerian lembaga, termasuk juga pihak istana, paspampres, protokol presiden dan seterusnya," jelas Sudarsono di Gedung Nusantara, Senin (07/8/2017).

Sekjen MPR, DPR dan DPD beserta jajarannya, sudah berkumpul dan mendiskusikan banyak hal untuk mempersiapkan tiga agenda utama. Pertama adalah Sidang Tahunan MPR di mana Presiden Joko Widodo akan menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara. Agenda kedua adalah pidato kenegaraan Presiden RI dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Indonesia Raya.

Sidang yang ketiga adalah rapat paripurna pembukaan masa sidang DPR tahun sidang 2017-2018. Presiden Joko Widodo akan menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar atau Keterangan Pemerintah

atas RUU tentang APBN beserta Nota Keuangan.

"Untuk kesekian kalinya, persiapan rapat. Bahkan hari ini kita rapat dengan seluruh protokol kementerian dan lembaga dan protokol istana, untuk mendiskusikan secara detail persiapan-persiapan baik sidang tahunan MPR, sidang bersama, maupun pembacaan nota keuangan pada tanggal 16 Agustus," papar Sudarsono.

Menurut keterangan koordinator penyelenggara acara persiapan yang dilaksanakan sudah 80 persen, sisanya akan dievaluasi kembali. Tema dekorasi yang akan diusung yakni menonjolkan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan desain sederhana tapi meriah. ■

(eko/sc), Foto: Arief/hr

DPR Dukung Penuh IAIN Palu menjadi UIN

Ketua Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi VIII DPR Noor Achmad menyatakan senang dan bangga melihat perkembangan IAIN Palu. Selain infrastruktur yang disiapkan, jumlah dosen 180 orang, Guru Besar sebanyak 4 orang, Doktor 65 orang, sisanya master, sehingga tidak ada lagi dosen yang berkualifikasi S1.



Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR Noor Achmad di IAIN Palu

"Melihat kondisi itu maka Komisi VIII tidak akan ragu-ragu untuk memback-up apa yang diinginkan IAIN Palu menjadi UIN," tandas Noor Achmad dalam pertemuan dengan Rektor dan civitas akademika IAIN Palu, baru-baru ini.

Hanya saja, kata politisi Golkar ini, untuk menjadi UIN guru besarnya perlu ditambah. Meski demikian Komisi VIII sekarang ini sedang concern untuk pengembangan perguruan tinggi (PT) di Indonesia Timur. Belum lama ke NTB, dan ke Palu dan alhamdulillah laporan dari Rektor luar biasa sehingga Komisi VIII tidak ragu-ragu mendukung IAIN Palu menjadi UIN.

Perjuangan gigih Komisi VIII, ujar Noor Achmad, ketika menjumpai Wapres Yusuf Kalla soal rencana membangun Universitas Islam Internasional Indonesia

(UIII) dengan mengusulkan anggaran 88 M, tapi Komisi VIII menolaknya. DPR mengajukan syarat supaya hutang-hutang kepada guru yang mendapatkan dana sertifikasi harus dibayar lebih dulu. "Itu persyaratan utama dan atas perjuangan Komisi VIII hutang tersebut sudah dibayarkan sebanyak Rp 4,6 triliun," ujarnya.

Syarat lain, ujarnya, Komisi VIII juga minta supaya jangan menomorduakan UIN atau IAIN yang sudah ada. "Adanya UIII jangan sampai mengkerdikan atau membonsai pada UIN, STAIN atau IAIN. Justru perguruan-perguruan Islam itu harus diperkuat," tegasnya.

Ditegaskan pula, IAIN Palu ini bagian terpenting bagi perjuangan Komisi VIII untuk meningkatkan kualitas PT-PT di lingkungan Kementerian Agama. Setelah

ada perkembangan dengan disediakan lahan 124 ha maka dalam periode DPR sekarang diharapkan sudah ada hasilnya

Rektor IAIN Palu Zaenal Abidin menjelaskan, pihaknya mengutamakan infrastruktur termasuk semua dosen memiliki kualitas bagus, maka tidak terlalu lama untuk mengubah menjadi UIN. "Pasti tim yang turun akan mengatakan, IAIN Palu layak menjadi UIN," jelas dia.

Menurutnya, saat ini di kawasan Indonesia Timur hanya ada 1 UIN Alaudin, padahal wilayahnya ada 9 Provinsi. Sementara di Jatim satu Provinsi ada 2 UIN, di Sumatera hampir semuanya sudah UIN dari Aceh, Medan, Palembang, Jambi hingga Lampung. Sedangkan di Indonesia Timur baru satu UIN. Karena baru satu maka IAIN Palu ingin menjadi UIN yang kedua. ■

(mp), Foto: Mastur/hr

BK DPR Beri Penjelasan Keparlemenan kepada Mahasiswa UIN Palembang



Kepala Badan Keahlian DPR Jhonson Rajagukguk foto bersama mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Kepala Badan Keahlian DPR Jhonson Rajagukguk memberikan pemahaman mengenai keparlemenan kepada 207 mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang berkunjung ke Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (08/8/2017).

“Parlemen di seluruh dunia semakin kuat dengan merangkul remaja, di Indonesia kita juga telah memiliki parlemen remaja. Parlemen remaja sendiri adalah amanat yang ditentukan oleh Inter Parliamentary Union (IPU) dan diselenggarakan seluruh dunia untuk memperkuat parlemen,” jelas Jhonson.

Amanat IPU, lanjut Jhonson yaitu melibatkan seluruh siswa-siswi dari seluruh provinsi di Indonesia. Tujuannya untuk mendidik remaja-remaja agar mempunyai dedikasi yang tinggi dan memiliki pemahaman tentang parlemen sehingga bisa memberikan kontribusi besar nantinya.

Lebih lanjut Jhonson mengatakan, yang paling utama adalah pemahaman mengenai parlemen itu sendiri, maka dalam kesempatan disampaikan mengenai tugas dan fungsi DPR, agar

mahasiswa memahami betul peran DPR. Salah satunya yang dijelaskan mengenai penyusunan Rancangan Undang-Undang.

Dalam penyusunan RUU, lanjut dia, tidak hanya DPR saja yang berperan tetapi ada Pemerintah. Tapi, sayangnya masyarakat masih berpikir hanya DPR yang membuat UU, sehingga penilaian negatif pun banyak kepada DPR, jika RUU tidak juga rampung.

“Kita berharap para mahasiswa betul-betul memahami tentang DPR, sehingga penilaian positif yang akan muncul, tidak seperti selama ini. Mahasiswa menganggap DPR banyak melakukan kesalahan, padahal tidak seperti yang mereka dapatkan di media,” tuturnya seraya mengungkapkan harapannya akan kunjungan seperti ini bisa terus dilakukan guna membangun

kepercayaan publik terhadap lembaga DPR.

Salah seorang dosen UIN Palembang, Said menjelaskan bahwa kunjungan ke lembaga pemerintah merupakan kegiatan rutin mahasiswa guna memahami hukum yang ada di Indonesia dan bagaimana negara ini diatur dengan Undang-Undang.

“Kami selaku dosen berusaha memberikan support kepada mahasiswa dengan mengunjungi lembaga negara, agar mereka mengetahui perkembangan dunia hukum, khususnya dengan berbagai macam varian legislasi,” ungkapnya.

Ketua BEM UIN Palembang, Husen juga berharap dari kunjungan ini, pihaknya dapat lebih memahami lagi apa yang belum diketahui selama ini melalui penjelasan Kepala Badan Keahlian DPR. “Kami mengucapkan terimakasih kepada DPR telah memberikan pemahaman mengenai tugas dan fungsi DPR yang selama ini hanya didapatkan melalui media, ini sangat bermanfaat untuk pengetahuan dalam mengembangkan ilmu kami,” pungkasnya. ■

(ria,mp), Foto: Ariftr



Perguruan Tinggi Papua Kekurangan Dosen

Banyak perguruan tinggi negeri maupun swasta di Papua mengalami kekurangan dosen. Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dengan Perguruan tinggi - perguruan tinggi di Papua baru-baru ini.

Kepada rombongan Tim Kunjungan Kerja Komisi X ke Papua yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X Ferdiansyah tersebut, Ketua Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XIV/Papua dan Papua Barat, Suriel S. Mofu menyampaikan tiga alternatif penyelesaian kekurangan dosen itu.

Pertama, melakukan mutasi dari dinas lain yang memiliki kualifikasi pendidikan S2 dengan jalur umum, kedua melalui mekanisme lolos butuh. Ketiga, afirmasi sarjana asli Papua yang ingin mengabdikan di lingkup perguruan tinggi di Papua. "Maka kita usulkan anak-anak Papua yang lulus S1 kita rekrut CPNS, disekolahkan untuk penuhi kekurangan dosen," jelas Mofu.

Lebih lanjut Mofu menjelaskan secara keseluruhan ada 60 PTS, 42 di Papua dan 18 di Papua Barat. Dari 100 jumlah keseluruhan dosen, hanya 6 diantaranya asli Papua.

Selain masalah kekurangan dosen, anggota Komisi X Reni Marlinawati menjelaskan ada dua masalah lainnya yang disampaikan. Pertama, terhentinya anggaran sarana dan prasarana untuk PTS dari Kementerian Dikti. Kedua, berkurangnya alokasi beasiswa.

Tentang kurangnya anggaran untuk sarana dan prasarana, Reni berpendapat, anggaran pendidikan Papua harusnya mencukupi. "Karena disamping anggaran dari Kementerian Dikti ada dana otsua 8 triliun untuk Papua dan 2,4 triliun untuk Papua Barat dan itu diberikan tiap tahun," imbuhnya.

Untuk masalah berkurangnya beasiswa, politisi PPP ini menjelaskan pengalokasian anggaran 60% untuk Pulau Jawa berkaitan dengan sasaran terwujudnya world class university. "Maka dibentuklah 11 perguruan tinggi menjadi BHMN (Badan Hukum Milik Negara) yang tentunya berbeda dengan perguruan tinggi non BHMN," terangnya. Selain 11 PT BHMN juga diberlakukan sistem ranking hingga 107 PTN.

"Untuk penyelesaian kurangnya BOPTN untuk wilayah Papua ini perlu ada koordinasi komprehensif antara Bappenas, Kementerian Keuangan, Kemendikti dan seluruh stakeholder di Papua dan Papua Barat sehingga dapat ditetapkan masalah prioritas untuk segera ditangani, baik itu kekurangan dosen maupun kekurangan sarana prasarana," imbuhnya. ■

(skr), Foto : Singgih/hr



Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR ke Papua

DPR Kembali Gelar Parlemen Remaja

Sekretariat Jenderal DPR RI akan menyelenggarakan kegiatan rutin tahunan Parlemen Remaja tingkat SMA/SMK/MA yang akan berlangsung pada 11-15 September 2017 di Griya Sabha, Bogor dan Kompleks DPR, Senayan, Jakarta.



Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Djaka Dwi Winarko saat Sosialisasi Parlemen Remaja

mampu meningkatkan kepercayaan pada DPR," ujar Djaka.

Peserta nantinya juga akan dibekali dengan simulasi kunjungan kerja dan simulasi berbagai rapat di DPR mulai dari rapat komisi hingga rapat paripurna. Diagendakan Pimpinan DPR dan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Budi Waseso akan hadir dalam pembukaan acara simulasi sidang ini.

Kegiatan ini adalah yang kesepuluh kalinya sejak pertama kali diselenggarakan pada tahun 2007. Sehingga diharapkan kegiatan ini dapat terus dilakukan dengan mempertimbangkan kreasi-kreasi yang dihadirkan di setiap tahun penyelenggaraannya.

"Ini kegiatan yang kesepuluh. Kita mulai kegiatan ini dari 2007. Kita berharap ada kreasi kegiatan agar tidak monoton. Kita juga berharap semakin banyak yang memahami dan mengerti tentang DPR. Nantinya para peserta juga akan diperlakukan layaknya Anggota DPR," pungkas Djaka. ■

(ns), Foto: Jayed/Inr

Melalui kegiatan ini diharapkan mampu memberikan edukasi politik bagi generasi muda untuk lebih mengenal dekat dengan DPR RI.

Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Djaka Dwi Winarko menjelaskan peserta yang dapat mengikuti kegiatan ini dipilih dari masing-masing provinsi sebanyak 4 orang, sehingga mereka yang dipilih adalah peserta yang terbaik dan telah memenuhi kualifikasi.

"Kita memilih 4 wakil dari setiap provinsi. Seleksi yang kita lakukan bekerjasama dengan UI. Yang dites berdasarkan pengetahuan tentang DPR," ujar Djaka dalam acara Sosialisasi Parlemen Remaja, Rabu (09/8/2017) di Operation Room, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Selama 5 hari, peserta Parlemen Remaja yang berasal dari seluruh Indonesia ini akan dibekali sejumlah materi seperti diskusi panel yang bertajuk 'Bahaya Narkotika dan Implementasi UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika' dan sebagai pembicaranya Anggota

Komis III DPR Arsul Sani dan Anggota Komisi II sekaligus Ketua Gerakan Nasional Anti Narkotika Hendry Yosodiningrat.

"Tema tahun ini kita angkat soal narkoba. Karena ini masalah yang luar biasa. Jatuhnya negara ini bisa terjadi melalui narkoba. Kalau generasi muda kena narkoba maka bisa semakin mudah merusak negara," ujar Djaka.

Selain itu, peserta juga akan mendapatkan materi tentang tugas dan mekanisme kerja DPR oleh Sekjen DPR Ahmad Djuned serta materi tentang mekanisme persidangan di DPR oleh Peneliti DPR Ahmad Budiman.

Melalui materi ini diharapkan peserta dapat memahami secara langsung tugas dan fungsi DPR secara menyeluruh. "Diharapkan dengan pemaparan ini akan

Parlemen REMAJA 2017
TINGKAT SMA/SMK/MA

PERAN PARLEMEN DALAM MENYELAMATKAN GENERASI MUDA DARI ANCAMAN NARKOBA

PERSYARATAN

1. Siswa SMA, SMK, MA pada kelas X, XI, dan XII di seluruh Indonesia
2. Mendaftar online dengan tema "Peran Parlemen dalam Menyelamatkan Generasi Muda dari Ancaman Narkoba" dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a) Diisi pada kertas A4, margin 2,5, spasi 1,5, dengan huruf TMR 12 pt
 - b) Jumlah halaman maksimal 3 halaman
 - c) Menggunakan Elemen Bahasa Indonesia yang dipaparkan
 - d) Dituangkan menggunakan tinta, nama sekolah, dan alamat sekolah pada awal
 - e) Tidak memuat hasil pemindaian sendiri, jika menggunakan referensi harus memuat sumber referensi (buku, majalah, koran)
 - f) File yang terupload jangan dihapus!
3. Mengunggah Curriculum Vitae (CV) pribadi di website ini
4. Email dan CV diunggah ke www.parlemenremaja.dpr.go.id diunggah dengan format sebagai berikut yang tertera pada formulir pendaftaran dan Kertas Seleksi
5. Surat Perijinan akan menjadi syarat tambahan sebagai syarat pendaftaran apabila tidak sesuai (berdasarkan):
 - a) Daftar Kartu Tanda Siswa
 - b. Lembar dalam buku atau dari CV
 - c. Bagi peserta yang tidak sesuai pada kegiatan tahun sebelumnya tidak diperkenankan mengikuti kembali pada tahun ini
 - d. Batas pendaftaran online melalui CV berakhir 20%

Setiap peserta akan mengikuti:

1. Training
2. Bekerja kelompok dan transportasi selama di Jakarta dan Bogor
3. Bagi peserta yang tidak sesuai akan dikembalikan ke sekolah
4. Surat Perijinan
5. Batas pendaftaran online melalui CV berakhir 20%

TIMELINE KEGIATAN

- 21 - 23 AGUSTUS: Pengumpulan Esai dan CV melalui website parlemenremaja.dpr.go.id
- 22 - 23 AGUSTUS: Seleksi online peserta
- 29 AGUSTUS: Pengumuman 136 peserta Parlemen Remaja 2017
- 11 - 13 SEPTEMBER: Pembukaan dan kegiatan Parlemen di Griya Sabha, Korpri, Bogor
- 14 SEPTEMBER: Simulasi sidang DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta

MAJLIS PERHIMPUNAN RAKYAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DEWAN PERWAKILAN DAERAH

SEKRETARIAT JENDERAL PARLEMEN REMAJA 2017

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BAKAS REPUBLIK INDONESIA

Pansus Angket KPK Terima Kunjungan Aktivis Pro Demokrasi

Pansus Angket KPK DPR RI menerima kedatangan gerakan aktivis Pro Demokrasi (Prodem) yang ingin berdialog secara langsung dengan Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa di ruang Posko Pengaduan Pansus Angket KPK, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (09/08/2017).

“Kedatangan Aktivis Prodem hari ini memang tidak dilakukan secara resmi atau formal melalui surat menyurat, kedatangan mereka lebih khusus ingin menemui saya selaku Ketua Pansus untuk meminta waktu berdialog,” jelas Agun.

Prodem yang notabene sebagai tokoh atau aktivis pergerakan ingin berdialog mengenai keberadaan Pansus KPK. Karena dalam kacamata Prodem, masalah politik pemberantasan korupsi itu tetap menjadi agenda utama yang harus dijaga dan dikawal.

“Prodem ingin agar prosesi kinerja Pansus Angket KPK tetap dalam koridor-koridor tertentu, jangan sampai membawa implikasi merusak tatanan demokrasi yang sudah dibangun sejak awal reformasi. Karena hal tersebut bisa menimbulkan hal-hal yang bersifat prinsipil, yakni ketika Pansus ini berakhir, maka akan ada semacam proses tindak lanjut yang dimungkinkan bisa memporakporandakan tatanan struktur bangunan demokrasi yang sudah ada,” papar Agun.

Selain itu, Prodem juga mempertanyakan, dengan adanya Pansus Angket KPK, lantas bagaimana kemudian dengan nasib lembaga KPK itu sendiri. “Menurut Prodem harus ada dialog dan diskusi yang terkait dengan sejumlah kewenangan dan eksistensinya, mereka ingin mengetahui apa-apa saja yang sudah didapatkan dan ditemui oleh Pansus, supaya kami juga bisa sharing dan memberikan kontribusi pemikiran mengenai langkah ke depannya akan seperti apa,” pungkasnya. ■

(dep.mp), Foto: Arif/ih



Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa bersama gerakan aktivis Pro Demokrasi



Tim Kunjungan Kerja Komisi XI dipimpin Melchias Marcus Mekeng berfoto bersama dengan Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteady dan beberapa mitra kerja di Kupang. Selasa (01/08/2017), Foto : Azka

Tim Kunjungan Kerja Komisi IV menabur 300 ribu benur udang faname di Desa Tumbu, Topoyo, Mamuju Tengah, Sulbar, Selasa (01/8/2017). Foto : Runi



Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI menggelar pertemuan dengan Dewan Kesenian Tanah Papua di Jayapura, Minggu (30/07/2017). Foto : Singgih